



# KLIPING

## BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Media cetak:
- Bangka Pos
  - Babel Pos
  - Babel News
  - Radar Bangka
  - Rakyat Pos
  - Lainnya: \_\_\_\_\_

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						✓									
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
		✓			
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									✓															

# Tarmizi: Disclaimer Tu Budu, Dak Terti Begawi

**SUNGAILIAT** - Alokasi dana desa nilainya cukup tinggi. Bahkan mulai tahun ini hingga seterusnya telah mencapai Rp 1 miliar. Terkait hal itu Bupati Bangka Ir. H. Tarmizi H. Saat, MM mengingatkan pihak desa untuk benar-benar dalam penggunaan dan pelaporannya.

"Informasi dari kementerian, dana desa paling kecil tidak boleh kurang dari Rp 1,4 miliar. Mulai tahun 2016 dan seterusnya dan cenderung naik terus dana desa ini," sebut Tarmizi. Untuk itu pihak desa perlu mempersiapkan beberapa hal. Sebab, dana desa tidak hanya menjadi tanggungjawab kepala desa saja tetapi harus ada kerjasama dengan sekretaris desa,

perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Desa (LPM) dan pihak terkait lainnya.

"Harus disiapkan oleh semua, tidak hanya tanggungjawab kepala desanya, sekdesnya, BPD dan LPM-nya. Bagaimana desa itu menyiapkan SDM sehingga dana desa ada penggunaan dan pertanggungjawabannya," ujar Tarmizi.

Berkali-kali ia mengingatkan, terkait pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Bangka termasuk keuangan desa sedang dalam pemeriksaan Badan Pemer-



Tarmizi Saat

iksaan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPK RI Babel). Sangat tidak diinginkan pemeriksaan BPK berujung dengan hasil disclaimer. "Saya tidak mau tahun ini pemeriksaan BPK ada disclaimer, tidak mau saya. Itu penghinaan terhadap semua pegawai negeri itu. Kalau ada kabupaten disclaimer itu budu, dak terti begawi. Jadi jangan sampai terjadi, makanya duit dana desa itu betul-betul, harus disiapkan SDM-nya," pesan Tarmizi.

Untuk mendukung kelancaran penggunaan dana desa, sepenuhnya adalah tanggungjawab kepada desa dalam mempersiapkan sumber daya manusia. Kepala desa bisa saja mencari lulusan SMEA jurusan akuntansi atau menyiapkan sumber daya manusia dengan menyekolahkan pada perguruan tinggi akuntansi. "Yang akuntansi, ada tuh akademi akuntansi. Jangan hanya menunggu petunjuk, harus bergerak sendiri. Karena pemeriksaan BPK, kalau biasa laporannya 4 macam sekarang 7 macam, SKPD juga sama. Ini jadi persoalan penting, karena dari laporan itu lah yang buat kita sulit tidur. Jadi saya berharap untuk dana desa itu betul-betul. (trh)